

Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Anggun Sasmita¹ Syapril Abdullah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoan, Pekanbaru, Indonesia
anggunsasmita@student.uir.ac.id syaprilabdullah@soc.uir.ac.id

Received : March 28, 2024;

Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

This research aims to find out the strategies and factors that hinder the village government in carrying out or implementing infrastructure development in Tanjung Beringin village, Bases Kuras sub-district, Pelalawan district. This infrastructure development is an obligation for every village government which creates many benefits for the community if development is carried out. So that this researcher can find out, analyze and describe the Village Government's Strategy in Implementing Infrastructure Development in Tanjung Beringin Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. This type of research uses a qualitative descriptive type. The research informants consisted of the Head of Tanjung Beringin Village, the Head of the BPD of Tanjung Beringin Village, the Secretary of Tanjung Beringin Village, the Head of General Affairs and Finance of Tanjung Beringin Village, the Head of RT 01 of Tanjung Beringin Village, the Head of RW 01 of Tanjung Beringin Village, and the people of Tanjung Beringin Village. Meanwhile, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this research show that the village government's strategy in implementing infrastructure development in Tanjung Beringin village, Pangkalan Kuras sub-district, Pelalawan district

Keywords: *Strategy, village government, infrastructure development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan apa saja faktor yang membuat terjadi penghambat pemerintah desa dalam melakukan atau melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Pembangunan infrastruktur ini ialah suatu kewajiban bagi di setiap pemerintah desa yang membuat banyak keuntungan bagi masyarakat apabila pembangunan di laksanakan. Sehingga peneliti ini bisa mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Informan Penelitian terdiri dari Kepala Desa Tanjung Beringin, Ketua BPD desa tanjung beringin, Sekretaris Desa tanjung beringin, Kaur Umum dan Keuangan desa tanjung beringin, Ketua RT 01 desa tanjung beringin, Ketua RW 01 desa tanjung beringin, dan masyarakat desa tanjung beringin. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.

Kata Kunci : *Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur*

Pendahuluan

Dari dulu hingga sampai sekarang desa senantiasa menjadi salah satu fokus perhatian dalam setiap pembahasan dalam suatu sistem pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, yang mana desa tersebut yaitu merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Namun demikian yang mana masih banyaknya suatu permasalahan yang muncul pada pemerintahan desa. Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa, maka banyak bermunculan berbagai program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang dimana program-program tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat perdesaan. Beberapa tujuan pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.
2. Tujuan jangka panjang pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, peluang berusaha, dan pendapatan, dengan pendekatan pembinaan lingkungan, pembinaan usaha, dan pembinaan manusia. Secara tidak langsung, tujuan ini juga bertujuan untuk membentuk fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional.
3. Tujuan pembangunan dalam jangka pendek adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Kemudian dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Rencana pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa adalah perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, sementara RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten. Adapun dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pada pasal 4 dan 5 tentang perencanaan pembangunan yang mana yakni:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b. penyusunan RKP Desa.

2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menjadi suatu tempat penelitian. Dimana dari sorek satu menuju ke Desa tanjung beringin ini memiliki jarak sekita 30 kilo meter (Km). Disisi lain yang mana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peningkatan mutu pembangunan masih belum sesuai dengan yang diharapkan peran BPD pun berjalan dengan baik. Dalam pembangunan desa diarahkan untuk memnafaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusia

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hasil penyelenggaraan pembanguan infrastruktur Desa Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan juga Untuk mengetahui faktor hambatan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian adapun pembangunan yang belum terlaksanakan sehingga terdapat beberapa fenomena mengenai pembangunan desa diantaranya:

1. Pembangunan Jalan Desa yang mana di tabel tersebut sudah terlaksana 100 persen, tetapi nyatanya dilapangan hanya baru terlaksana 950 meter (M) dan belum benar dikatakan terlaksana 100 persen yang sebagaimana di cantumkan di tabel tersebut.
2. Pembangunan Gedung, Bangunan dan Taman yang mana dari ketiga ini dapat dilihat bahwa bangunan Taman di Desa tanjung beringin belum sama sekali terlaksana sebagaimana yang di cantumkan di tabel tersebut yang di katanakan sudah 100 persen namun nyatanya dilapangan belum terlaksana sama sekali.

Tinjauan Pustaka

Keberhasilan dalam suatu pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah desa dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa yang baik yang mana pembangunan yang dilakukan desa secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasi yang lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa tersebut. Namun Stategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, startegi bisnis bisa berupa perluasan geografis, difersifikasi, akusisi, pengembangan dan juga jangka panjang yang

dinsusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian pada tujuan dan sasaran tertentu (David dan Fred 2010).

Namun dalam mencapai suatu Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah desa dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa yang baik dengan demikian yang dimana menurut (David dan Fred 2010), indikator variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, dipersembahkan konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi merupakan suatu fungsi yang memegang peranan penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.
2. Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap pembangunan) dengan semua mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.
3. Organisasi adalah sekelompok orang bekerja sama dalam struktur dan koorganisasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.
4. Strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Infrastruktur merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan dari beberapa jenis fasilitas yang dibuat secara khusus untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur memiliki peran yang sangat luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya.
7. Pembangunan Desa adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
8. Strengths (Kekuatan) adalah komponen yang memberikan keunggulan dan keuntungan dalam bisnis dibandingkan dengan yang lainnya.
9. Weakness (Kelemahan) adalah komponen yang akan menentukan dan mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam bisnis yang sedang dijalankan.
10. Opportunities (Peluang), dengan memahami peluang, maka dapat mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan di masa mendatang.
11. Threats (Ancaman) adalah komponen ini berguna untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko atau tantangan yang mungkin dihadapi saat menjalankan tugas atau aktivitas tertentu.

Metode

Tipe Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Sumber Data primer adalah informasi langsung yang terdiri dari beberapa indikator dan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan, seperti data dari observasi dan wawancara

dan Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Namun data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, website dan undang-undang.

Setelah Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yang berarti data tersebut dianalisis dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Hasil analisis, baik dari studi lapangan maupun studi literatur, kemudian akan mengklarifikasi temuan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di desa. Dalam konteks ini, tugas pemerintah desa adalah merancang rencana pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia sesuai dengan kewenangan mereka, dengan mengikuti pedoman dari rencana pembangunan yang lebih besar di tingkat kabupaten/kota.

Namun pembangunan desa juga merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional karena karena desa beserta masyarakatnya basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Sebelum membahas hasil penelitian yang diperoleh mengenai strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan pengkalan kuras kabuapten pelalawan, maka dari itu terlebih dahulu menguraikan mengenai identitas dari informan sebagai gambaran sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini. Tujuan pembangunan infrastruktur desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Yang mana menggunakan variable menurut david dan fred (2010) dan indikator yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Kekuatan (Strengths), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats).

1. Kekuatan (strength) dalam pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Yaitu kekuatan dan karakteristik organisasi yang mana memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun demikian kekuatan ini juga suatu kebijakan Sumber Daya manusia yang masih memadai dan terdapat anggaran dalam pembangunan infrastruktur di desa.

Penulis Telah Melakukan Wawancara Kepada Bapak Syafri selaku Kepala Desa Tanjung Beringin :

“Ada banyak, diantaranya adanya sumber daya alam yang mana seperti tanah, air dan kayu, ada juga sumber daya manusia yang mana memnafaatkan tenaga kerja lokal yang ada di desa tanjung beringin, dan juga ada bebrapa potensi lainnya yang ada di desa tanjung beringin yang misalnya ada juga sektor peternakan, perkebunan, dan juga peranian. Adapun juga potensi seperti non fisik desa yang mana terdapat dari sikap gotong royong, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan juga aparatur desa. Namun kalau dilihat dari sumber daya alam salah satunya contoh seperti air di desa tanjung beringin ini belum menggunakan air bersih atau di sebut juga air sumor bor yang mana masyarkat desa tanjung beringin ini

menggunakan air pribadi atau membuat sumur bor pribadi sendiri dirumah. Sempat jalan bebrapa bulan air bersih kerumah-rumah namun ada yang tidak kebagian terpaksa air bersih tersebut di hentikan secara permanen maka dari itulah masyarakat desa tanjung beringin membuat sumur bor pribadi dirumah masing-masing". (27 november 2023).

Peneliti Masih melakukan wawancara bersama kepala Desa Tanjung Beringin:

"Dengan cara memanfaatkan segala potensi yang ada di desa tanjug beringin dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam di desa dan mengoptimalkan tenaga kerja lokal desa guna untuk menunjang pembangunan di desa. Namun demikian di desa tenajung beringin tersebut sudah mulai melakukan yang namanya pelapisan jalan seminisasi yang sudah retak-retak atau sudah berlubang yang sudah mulai hancur agar membuat kenyamanan dan keamanan dalam berkendara masyarkata setempat, maka dari itula para tenaga kerja loka bisa melakukan aktivitasnya dengan melakukan pekerjaan yang ada di desa dan sudah di rencanakan terlebih dahulu, dengan menggunakan dana yang seadanya. (27 november 2023)

Dari wawancara di atas bahwasanya pihak pemerintah desa tersebut sudah ada rencana untuk melakukan dan meningkatkan pembangunan di desa tetapi hanya butuh waktu rancangan terlebih dahulu untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Sehingga bapak kepala desa berkata bahwa untuk melakukana dan meningkatkan pembangunan seperti di desa lain itu ada cuman membutuhkan suatu atau sebuah proses. Hal ini tertuang didalam rencana pembangunan desa itu yang mana dalam melakukan pembangunan membutuhkan dana dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp. 122.000.000 juta namun dengan biaya ada belum juga tepat sasaran karena biaya yang belum mencukupi untuk melakukan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian bahwasannya pemerintah desa memiliki kekuatan dalam melakukan rencana pembangunan desa yang belum tepat sasaran hingga sampai meencapai suatu keberhasilan dalam melakukan pembangunan tersebut dan juga pemerintah desa bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.

2. Kelemahan (Weakness) dalam pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada oraganisasi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang menjadi kelemahan di desa tanjung beringin kecamatan pengakalan kuras kabupaten pelalawan ini yaitu terdapat pada bidang partipasi masyarakat yang mana yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Disini dapat dilihat bahwasan nya kelemahan yang ada di desa tanjung beringin ini masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat setempat dalam menghadiri rapat, dikarenakan kurangnya sosialisai pemerintan desa terhadap masyarakat tersebut sehingga membuat masyarakat enggan untuk menghadiri rapat yang selalu di adakan.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara kepada Bapak Yanto S.Pd selaku Kutua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa tanjung beringin:

"bapak yanto berkata tentu saja jelasnya minim dana yang dapat mempengaruhi terealiasinya pembangunan desa, yang mana terutamanya di bidang pembangunan fisik yang mana di

bidang pembangunan ada banyak pembangunan yang belum terlaksana atau terealisasi di desa ini sebagaimana yang sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti pembangunan TK/PAUD, Air Bersih, Drainase, Taman, Jalan seminisasi, dan juga ada beberapa bangunan fisik lainnya yang belum terealisasi, ini menyebabkan minimnya dana yang mengakibatkan belum terealisasinya pembangunan, seperti pembangunan jalan seminisasi yang mana baru terealisasi hanya beberapa kilo, pembangunan taman yang di Undur, karena dana yang sangat minim. (27 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yanto S.Pd mengenai pembangunan ini berpengaruh pada anggaran dana yang masih kurang cukup untuk melakukan pembangunan yang sesuai diharapkan oleh masyarakat, maka dari itu dengan masih kurangnya anggaran dana maka proses pembangunan akan juga terhambat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rudi Hartono S.IP selaku Sekretaris Desa tanjung beringin:

“menurut bapak rudi yang menjadikan kelemahan dalam mewujudkan pembangunan di desa tanjung beringin yaitu kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa, yang mana ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dalam melaksanakan suatu pembangunan sehingga membuat suatu pembangunan yang mau dibangun jadi terhambat karena kurangnya setuju dari masyarakat, selain itu ada juga pihak masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam hal rapat sehingga tidak tau apa yang mau di rencanakan untuk pembangunan yang membuat kurangnya setuju dalam hal pembangunan, di sisi lain masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam hal suatu kerja sama di desa seperti salah satu kegiatan gotong royong itulah yang membuat lemahnya dalam mewujudkan pembangunan di desa tanjung beringin ini.(27 november 2023)

Dari hasil wawancara bersama bapak rudi hartono S.IP bahwasannya kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang atau dalam melakukan untuk rencana pembangunan di desa tersebut sehingga membuat terhalangnya pembangunan yang akan dilaksanakan akibatnya ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi penelitian mengenai kelemahan dalam melakukan rencana pembangunan di desa tanjung beringin ini yaitu ketidaksetujuan dari masyarakat desa dalam melakukan rencana pembangunan yang sebagaimana diharapkan oleh pemerintah desa.

3.Peluang (Opportunity) dalam Pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasuk merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Namun demikian peluang ini juga yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun untuk dapat berkembang di kemudian hari.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ebi Yana selaku Kaur Umum dan Keuangan di desa tanjung beringin :

“Bisa sekali, karena dengan banyaknya pembangunan di desa, maka semakin banyak masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja, seperti masyarakat yang kurang mampus atau

hidupnya kurang berkecukupan dengan hasil kerja yang lain dari situ dengan adanya melakukan pemangunan di desa tanjung beringin ini makanya mata pencaharian masyarakat desa tanjung beringin yang kurang mampu bisa menambah keuangan bagi mereka yang kurang mampu atau bagi yang pengangguran, dan bagi yang pengngguran yang tadinya tidak ada pekerjaan maka dengan adanya melaksanakan pembangunan di desa membuat para tenaga kerja masyarakat jadi ada atau mata pencaharian jadi ada. (28 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ebi yana selaku kaur umum dan kaur keuangan yang mana disini apabila pemerintah desa melakukan pembangunan makanya semakin bagus peluang yang akan didapat oleh masyarakat apabila rencana pembangunan dilakukan.

Penulis melakukan wawancara bersama bapak Sujang selaku ketua RT 01 di desa tanjung beringin:

“bapak sujang mengatakan ada yang bisa dan ada juga yang tidak, yang mana salah satu contohnya yang bisa pembangunan sector transportasi, misalnya pembangunan jalan seminisasi di desa yang sudah mulai terealisasi dan ada sebagian yang belum terealisasi, dengan dibangunnya jalan desa yang sudah layak atau sudah tereliasai bisa membuat aktifitas masyarakat di bidang transportasi menjadi mudah dan juga membuat kenyamanan masyarakat desa, namun demikian ada juga yang dikatakan tidak itu seperti salah satunya pembuatan taman yang belum di laksanakan sama sekali ntah itu kekungan dana ntah itu lokasi yang tidak memadai itu saya juga kurang tau.(28 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sujang selaku ketua RT 01 dalam melakukan pembangunan jalan seminasi ini belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumentasi penelitian mengenai kondisi kinerja antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembangunan jalan ini sudah mulai baik agar membuat kenyamanan pengendara dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Maka dari itu pemerintah desa dan juga masyarakat sudah saling bekerjasama dan memberi kepercayaan dalam melakukan ketercapaian terhadap pembangunan tersebut.

4. Ancaman (Threats) dalam Pembangunan infrstruktur di desa tanjung beringin

Yaitu suatu anacaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya. Ancaman di desa tanjung beringin ini yaitu terkendalanya olah Jalan yang mana jalan poros keluar nya masuk akses masyarakat desa tanjung beringin ini bisa dikatakan tidak baik karena apabila hujan jalan tersebut menjadi licin dan juga becek apabila dilalui mobil dan membuar para pengembara sepeda motor susah untuk melaluinya yang diakibatkan licin itulah yang menjadi ancaman bagi para mayarakat desa tanjung beringin. Namun demikian apabila hujan turun mobil muatan atau angkutan buah kelapa sawit ini susah juga untuk melewati jalan tersebut karena tanah di desa tanjung beringin ini yaitu memiliki warna kuning itulah yang membuat jalan selalu licin apabila hujan dan susah dilewati para pengendara.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara bersama Bapak Kandar selaku ketua RW 01 di desa tanjung beringin:

“Tidak, malah justru sebaliknya dengan adanya banyak pembangunan infrastruktur di desa yang di rencanakan maka semakin menguntungkan bagi para masyarakat di desa ini, karena tidak terdapat ancaman bagi masyarakat desa jika pembangunana terlaksana dengan sesuai apa yang sudah di sepakati bersama, jika adanya ancaman itupun paling saja mengenai pasrtisipasi masyarakatnya, apabila masyarakat ini saling berkerja sama maka tidak akan ada ancaman dalam pembangunan infrastruktur di desa ini. Ucapan kata bapak kandar selaku ketua RW 01 di desa tanjung beringin. (29 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak kandar, bahwasannya tidak ada ancaman bagi masyarakat dalam melakukan rencana pembangunan, namun demikian malah menguntungkan bagi masyarakat apabila banyaknya rencana pembangunan yang akan dilakukan atau dilaksanakan.

Penulis melanjutkan wawancara yang terakhir kepada masyarakat desa yang mana yakni bapak Muhadi selaku atau sebagai masyarakat biasa:

“ Tidak, karena sebagian pembangunan di desa tanjung beringin ini merata, dengan pembangunan yang merata maka kecil kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial di desa, mungkin pun kalau ada kecemburuan sosial paling tidak itu terdapat pada sistem suatu perdagangan masyarakat di desa, kalau masalah kecemburuan sosial dalam pembangunan palingan masalah jalan agar bisa di perbaiki senyaman mungkin itupuan hanya beberapa masyarakat yang kecemburuan sosial nya yang tinggi. Ucapan bapak muhadi. (29 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak muhadi, yang mana dalam melakukan pembangunan di desa kecil kemungkinan kecemburuan sosial itu datang karena pemerintah desa akan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya supaya bisa membuat kenyamanan dan keamanan dengan adanya rencana pembangunan tersebut.

Selanjutnya peneliti wawancara bersama masyarakat biasa yang bernama ibu Temong

“ Menurut saya kecemburuan sosial itu pasti ada tapi hanya kemungkinan besar sebagian yang mempunyai dendam atau tidak tegur sapa dengan masyarakat desa ini, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial itu tumbuh dan menjelek-jelekan pembangunan yang ada di desa ini, atau bisa juga ketidak sukaan terhadap cara pimpinan kepala desa yang sekarang, mungkin itu yang sering terjadinya dan menimbulkan kecemburuan sosial. (29 November 2023)

Berdasarkan Hasil wawancara bersama ibu temong yang mana kecemburuan sosial dalam masalah pembangunan tersebut tentu ada sehingga sering terjadi bermusuhan antara pemerintah dengan masyarakat tersebut. Maka dari itu diperlukanya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat agar menghindari kecemburuan sosial yang ada.

Selanjutnya pebeliti melakukan wawancara bersama Ibu kayang selaku masyarakat biasa

“ kecemburuan sosial bagi setiap masyarakat itu pasti ada yang terpenting bagaimana cara kita itu tidak merusak atau menjelek-jelekan pekerjaan orang lain, adapun juga terkadang konflik terhadap desa tetangga hanya karna di perbandingan dengan masalah pembangunan yang masih banyak kurangnya sehingga menimbulkan konflik sosial atau pertentangan antara sesama masyarakat”. Ucapan ibu kayang. (29 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu kayang yang mana dalam setiap melakukan pembangunan itu pasti ada yang namanya tidak setuju sehingga mengakibatkan saling menjatuhkan satu sama lain. Namun demikian pemerintah desa juga bisa menyesuaikan apa yang di kehendaki masyarakat.

Peneliti melakukan Wawancara selanjutnya bersama Ibu Ita selaku masyarakat biasa:

“Setau saya yang namanya kecemburuan sosial itu tentu pasti ada, nah itu sama masyarakat di desa bahkan bisa juga sama keluarga sendiri, yang kadang tidak mengikuti arahan yang di berikan oleh pemerintah desa, sehingga timbulah sebuah kecemburuan sosial atau konflik sesama warga atau masyarakat itu sendiri dan menimbulkan selisih paham sehingga berdampak timbul sebuah percekocokan, salah satunya yaitu misalnya di kampung ujung pembangunan jalan seminisasi ini sudah terealisasi sedangkan di awal masuk kampung hanya beberapa kilo saja yang baru terealisasi itulah yang menyebabkan kecemburuan sosial atau konflik timbul dan bisa di katakana seperti pilih kasih.” Ucap ibu Ita. (29 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu ita yang mana dalam melakukan pembangunan itu pasti ada yang namanya kecemburuan sosial atau konflik karena setiap masyarakat pasti ingin melihat pembangunan itu yang terbaik supaya bisa membuat kenyamanan dan keamanan bagi setiap pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa pun akan melakukan yang terbaik buat masyarakatnya.

Penelitian melakukan Wawancara bersama Ibu Susi selaku masyarakat biasa:

“Bisa jadi, karena kecemburuan sosial itu biasanya sering timbul dalam suatu pelaksanaan pembangunan, karena dalam tenaga kerja bisa juga menimbulkan suatu terkendalanya pembangunan akibat para pekerja atau tenaga kerja lokal misalnya dalam pembangunan jalan seminisasi yang mana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh desa tersebut hanyalah orang yang pengangguran dan juga tidak mampu, dari situ bisa menimbulkan kecemburuan sosial atau konflik”. Ucap ibu Susi. (29 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu susi selaku masyarakat desa yang mana dalam melakukan pembangunan di desa tentu harus melakukan persetujuan antara pemerintah desa dan juga masyarakat desa supaya dalam melakukan rencana pembangunan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin supaya apa yang diinginkan masyarakat bisa berjalan dengan sesuai tepat waktu dan juga terhindar dari konflik dan juga kecemburuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi informasi yang peneliti ketahui bahwa pihak pemerintah desa tersebut sudah merencanakan untuk pembangunan kedepannya agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau konflik yang terjadi di masyarakat desa. Pemerintah desa akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan desa terhadap pembangunan, dengan adanya melakukan perbaikan dalam pembangunan maka akses keluar masuk di jalan bagi pengendara masyarakat desa juga bisa melalui nya dengan kenyamanan dan juga aman. maka dari itu pemerintah harus melakukan yang terbaik demi kenyamanan masyarakat dan terhindar dari konflik-konflik yang ada.

Hambatan-Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Beringin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi suatu hambatan di dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya anggaran/ dana untuk melakukan pembangunan di desa tanjung beringin sehingga masih banyak pembangunan yang masih belum terealisasi. Yang mana hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dari peneliti yang dimana pemerintah desa sudah merencanakan perbaikan pelapisan jalan seminiasi di desa tersebut.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan atau mewujudkan pembangunan infrastruktur di desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dimana di desa tanjung beringin masih kurang partisipasinya terhadap pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Yang mana banyak peneliti temukan berdasarkan observasi langsung ke lapangan dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada seluruh informan yang di perlukan dengan 4 (Empat) indikator yaitu ada Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator kekuatan terlihat bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembangunan sebaik mungkin, namun dalam segi pembangunan sudah mempunyai kekuatan sehingga dalam segi pembangunan jalan seminiasi tersebut sudah mulai membaik atau nyaman untuk di lalui.
2. Pada indikator kelemahan ini terlihat bahwa pemerintah desa belum melakukan atau melaksanakan pembangunan yang sesuai apa dan di rencanakan seperti apa yang di cantumkan dia dalam sebuah laporan tersebut, karena mengakibatkan masih minimnya anggaran/ dana yang belum cukup atau masih kurang, dan mengakibatkan banyaknya pembangunan yang belum terealisasi contohnya seperti pembangunan Taman.
3. Pada indikator Peluang dengan pemerintah desa melaksanakan pembangunan makanya banyak peluang atau tenaga kerja lokal yang bisa terlibat di dalam suatu pembangunan di desa tersebut dan dapat mengurangi pengangguran. Hal tersebut agar bisa membantu masyarakat desa yang pengangguran dan kurang mampu mendapatkan kerja.
4. Pada indikator ancaman terlihat bahwa masih ada ancaman atau konflik apabila melakukan pembangunan yang mana pemerintah desa bisa menghindari ancaman dari masyarakat tersebut, seperti sering terjadinya omongan-omongan masyarakat yang kurang beretika sehingga menimbulkan ancaman bagi pemerintah desa.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Rapi Caniago 2022. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa lubuk bilang kecamatan rambah samo kabupaten rokan hulu, studi fisipol ilmu pemerintah universitas islam riau.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM

BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis-Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and*

Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2),

- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of

quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Sri Lusi Tania 2022. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan infrastruktur di desa sialang kayu batu kecamatan bunut kabupaten pelalawan, Studi ilmu pemerintah universitas islam riau.

Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta:

Graha ilmu

Arsyad, Lincoln. 2011, Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal,

Yogyakarta: UPP STIM-YKPN Yogyakarta

Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987, Manajemen Pembangunan untuk

Negara Berkembang, Jakarta: LP3ES

Collier, William. 1996, Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa,

jakarta: Yayasan Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Abdurokhman. 2014. Pengembangan Potensi desa. Widyaiswara pada kantor diklat Kabupaten Banyumas.

Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Mempercepat Pembangunan Ekonomi Perdesaan. Volume 14 Nomor 1.

Rusdin Nawi. 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Tutuhu Kecamatan Morontai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morontai (Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makasar).

Candra Yan Wirawan, 2015, Strategi Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 (Studi Di Kabupaten Jombang), (Jurnal Atikel Ilmiah Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang).

Regulasi:

Anggun Sasmita dan Syapril Abdullah

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024

347

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah.